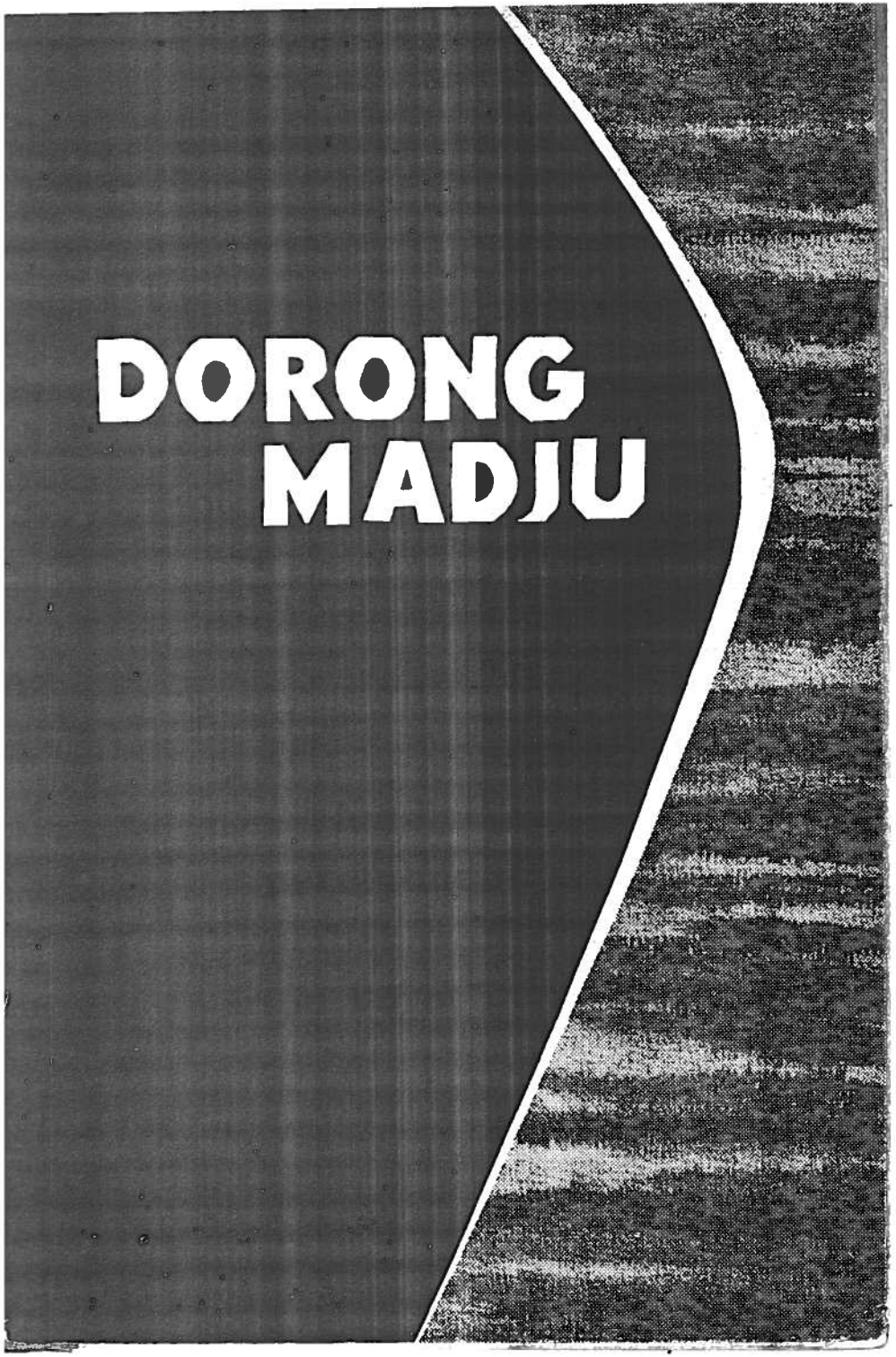

DORONG
MADJU



Njono — Ketua D.N. SOBSI

DORONG MADJU DEMOKRASI DAN PRODUKSI SERTA LANDJUTKAN PERDJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

*

Laporan Umum Presidium
kepada
Sidang ketiga
Dewan Nasional SOBSI

*

disampaikan oleh:
NJONO — Ketua D.N. SOBSI

Diterbitkan oleh:
Dewan Nasional SOBSI
Djakarta, Oktober 1962

DORONG MADJU DEMOKRASI DAN PRODUKSI SERTA LANDJUTKAN PERDJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT.

Saudara^2 jang tertjinta!

Dengan suara bulat dan segera mantap, Sidang Ke-II Dewan Nasional SOBSI di Djakarta pada achir bulan Agustus 1961 telah mensahkan Laporan Umum Presidium tentang Aksi, Kader dan Demokrasi.

Laporan Umum Presidium tentang „tiga-soal-penting" itu telah mendjiwai kegiatan^2 SOBSI dan Serikatburuh^2-Anggotanja dalam mempertinggi seni-aksi, mengurus kader dan memperluas demokrasi. Semua kegiatan ini telah memperkuat kemampuan organisasi dalam melaksanakan „empat-tugas-besar-SOBSI", jaitu tugas^2 memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia, memperluas organisasi SOBSI diseluruh negeri, memperteguh persatuan nasional jang berporoskan NASAKOM dan memperhebat perdjuangan Rakjat menjelesaikan tuntutan^2 Revolusi Agustus 1945. Pelaksanaan tugas^2 besar itu telah mentjapai hasil^2 besar selama setahun ini.

Dalam memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1961 telah berhasil dibentuk Sekretariat Bersama Perdjuangan Buruh Pelaksanaan Tri-Komando-Rakjat jang anggota^{2}nja terdiri dari SOBSI, KBKI, SOBRI, SARBUMUSI, GOBSI-INDONESIA dan GASBIINDO. Salah satu hasil penting daripada Sekretariat Bersama Vaksentral^2 adalah penjelenggaraan bersama perajaan Hari Kemenangan Kaum Buruh Sedunia, Hari 1 Mei 1962, di Istana Negara, dimana Presiden Sukarno memberikan Amanat jang sangat berharga. Sekarang sedang diusahakan perluasan keanggotaan dan pembentukan Sakretariat Bersama Vaksentral^2 di-daerah^2. Dengan tergalangnja Sekretariat Bersama Vaksentral^2 gagallah setjara total usaha^2 reaksioner jang mentjoba memaksakan pembentukan OPPI untuk membubarkan SOBSI dan vaksentral^2 lainnja.

Semangat persatuan djuga berkembang madju dikalangan pegawai negeri. Usaha² petjahbelah melalui apa jang dinamakan PSPN dan usaha² reaksioner jang mentjoba membubarkan serikatburuh² dibeberapa departemen tidak berhasil menghalang-halangi kegiatan² RKS-Pegawai-Negeri dipusat dan di-daerah². RKS-Pusat-Pegawai-Negeri dibentuk pada tahun 1954, dengan demikian telah berhasil memelihara kerdjasama serikatsekerdja² dan serikatburuh² pegawai negeri selama 8 tahun. Sekarang RKS-Pusat-Pegawai-Negeri menghimpun 58 organisasi jang mewakili suara satu setengah djuta pegawai dan pekerdja negeri. Pada tanggal 29-31 Djuli 1962, di Djakarta telah dilangsungkan Seminar RKS-Pusat-Pegawai-Negeri jang berachir dengan sukses besar. Seminar tidak hanja menjatakan kebulatan tekad pegawai negeri dalam pelaksanaan Trikora, djuga menuntut pensitaan semua modal Belanda, pendemokrasian pelaksanaan pembangunan, rituling organisasi dan personalia di-departemen² dan djawatan², pelaksanaan Undang² Pokok Kepegawaian, pelaksanaan TKS, kenaikan upah pekerdja negeri, perbaikan distribusi, perluasan hak² demokrasi dan pembentukan Kabinet Gotong-Rojong. Keputusan² Seminar ini mentjerminkan meningkatnja kesedaran politik dan organisasi dari massa pegawai negeri.

Kemadjuan² lain dibidang persatuan kaum buruh Indonesia adalah tertjapainja matjam² tuntutan² atau konsepsi² bersama antara vaksentral² dan serikatburuh² dipusat, daerah dan lapangan-kerdja mengenai soal² sosial-ekonomi, demokrasi dan likwidasi sisa² kolonialisme, dalam hal mana SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI mengambil inisiatif² setjara aktif. Kerdjasama antara serikatburuh² dengan kaum intelektuil jang banjak sangkut-pautnja, dengan kaum buruh seperti pedjabat², ahli² tehnik, dokter² perusahaan, jurist² dll.nja nampak berkembang madju. Diskusi² untuk memperbaiki kerdjasama serikatburuh² dengan kaum intelektuil sekarang mulai diorganisasi dilingkungan SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI.

Setjara pokok dapatlah dikatakan, bahwa politik reaksioner kaum kapitalis birokrat dan komplotannja jang mentjoba membubarkan SOBSI dan organisasi² buruh lainnja serta mentjoba memetjah-belah persatuan kaum buruh telah mengalami kekalahan². Tetapi kita tidak

lekas puas diri. Kita tahu, bahwa kaum kapitalis birokrat dan anasir² reaksioner lainnja masih belum „minggir atau dipinggirkan", sebagaimana dinjatakan dalam RESO-PIM, dari kedudukan²nja jang penting di-perusahaan² negara dan di-alat²-negara lainnja. Mereka masih sempat melakukan matjam² pentjolengan atas kekajaan dan keuangan negara. Matjam² tindakan anti-demokrasi, anti-buruh, anti-Rakjat dan anti-Manipol masih mereka lakukan. Kaum buruh perkebunan, kaum buruh gula, kaum buruh dilapangan perdagangan dan kaum buruh di-perusahaan² negara lainnja masih mengalami matjam² tipuan, antjaman dan paksaan untuk masuk PTK, Perkapen dan persatuan² „karjawan" lainnja. Apa jang dinamakan persatuan² „karjawan" ini dalam prakteknja bukan merupakan serikatburuh² jang dibentuk setjara sukarela oleh kaum buruh, tetapi merupakan "company-unions" atau „perserikatan² madjikan" jang dibentuk dari atas dan setjara paksa dengan menjalahgunakan wewenang² djabatan. SOBSI dan semua Serikatburuh Anggotanja ber-sama² dengan vaksentral² dan serikatburuh² lainnja masih harus berdjuang, supaja „perserikatan² madjikan" itu tidak diperlakukan sebagai serikatburuh².

Dalam memperluas organisasi SOBSI diseluruh negeri, selama setahun ini telah tertjapai kemadjuan² organisasi jang sangat penting. Dengan menempuh matjam² kesulitan dan rintangan, djatah tahun 1961, tahun pertama pelaksanaan Plan 3 Tahun SOBSI tentang organisasi dan pendidikan, pada pokoknja dapat diselesaikan.

Selama tahun 1961, djumlah anggota SOBSI telah bertambah hampir 300.000 orang, sehingga djumlah anggota SOBSI seluruhnja sekarang adalah lebih dari 3.100.000 orang. Djumlah kelompok, bagian, organisasi-basis, SOBSI-Tjabang dan SOBSI-Daerah djuga bertambah banjak, dengan demikian organisasi SOBSI semakin meluas diseluruh negeri. Aktivis² di-organisasi-basis² jang sudah dididik berdjumlah tidak kurang dari 10.000 orang, disamping itu pendidikan tjalon² guru jang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan aktivis² organisasi-basis setjara besar²an sudah mulai dikerdjakan.

Dibidang aksi, kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI makin menguasai garis „seribu satu matjam aksi". Anggapan², bahwa hanja „aksi² total" atau „aksi²

frontal" sadja jang bisa membawa hasil dan gedjala² mau „aksi habis²an" pada umumnja telah dapat dikikis. Prinsip² „mengutamakan kepentingan front persatuan nasional, dengan tetap membela kepentingan kaum buruh dan tanpa melepaskan kebebasan organisasi" pada pokoknja telah didjadikan pedoman umum dalam memimpin setiap aksi.

Selama setahun ini jang merupakan tahun pelaksanaan Trikora dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat tidak terdjadi gelombang² pemogokan. Jang umum dilakukan adalah aksi² sosial-ekonomi jang bersifat ringan, berupa desakan² lewat pengiriman² surat² dan delegasi², dikombinasi dengan musjawarah² dan dengan kegiatan² di-Lembaga² Demokrasi.

Aksi² sosial-ekonomi itu ternjata banjak jang berhasil, karena aksi² ringan itu tetap bersifat massal dan disertai dengan matjam² usaha untuk menarik simpati umum dari berbagai golongan Rakjat dan berbagai kalangan pedjabat, baik sivil maupun militer, melalui pendjelasan² tentang adil dan mendesaknja tuntutan² kaum buruh. Semua pengalaman aksi ini telah mempertinggi kemahiran badan² pimpinan organisasi dalam memimpin aksi² kaum buruh berdasarkan prinsip² massal, kombinasi dan mentjegah salah sasaran, dengan tidak terpaku pada satu tjara dan satu bentuk aksi. Dapat dikatakan, bahwa kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI makin terlatih dan terdidik serta makin mampu mengambil inisiatif dalam keadaan jang bagaimanapun. Apapun jang dihadapi, angin sedjuk ataupun angin taufan, kita tidak akan kehilangan akal dalam mengatasinja ber-sama² dengan djutaan kaum buruh jang bersatu dibawah pandji² SOBSI, jang bertambah hari bertambah meluas organisasinja diseluruh negeri, bertambah meningkat kesedaran politik massa anggotanja, bertambah tinggi seni-aksinja, bertambah banjak inisiatif²nja, bertambah madju tjara berfikir dan tjara kerdja kader²nja dan terus naik martabatnja dalam kehidupan nasional Rakjat Indonesia.

Dalam memperteguh persatuan nasional dan memperhebat perdjuangan Rakjat untuk penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945, sedjak Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta mengumumkan Tri-Komando-Rakjat untuk membebaskan Irian Barat,

SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja telah mengambil sikap dan langkah² jang tepat. SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja mendukung sepenuhnja Trikora dan memadjukan sembojan-aksi „gempur imperialis Belanda di Irian Barat dan atasi krisis sandang-pangan!". Dengan sembojan-aksi ini kita berhasil mendorong pemerintah mengambilalih BPM Tjepu dan melawan kampanje reaksioner kaum kapitalis birokrat jang mentjoba menutupi kedjahatan²nja dibidang ekonomi dan keuangan negara dengan menjalahgunakan Trikora dan menjatakan bahwa selama Trikora, kaum buruh dan Rakjat tidak boleh menuntut perbaikan penghidupan. Kampanje reaksioner kaum kapitalis birokrat itu achirnja tidak dapat pasaran.

Selain memobilisasi kaum buruh untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan² dan menuntut latihan² kemiliteran di-tempatkerdja², pada tanggal 27-29 Maret 1962 Dewan Nasional SOBSI menjelenggarakan Konferensi Nasional SOBSI untuk mempertinggi produksi dan melantjarkan distribusi pangan. Setelah menjimpulkan, bahwa keadaan pangan bagi Rakjat bertambah buruk, produksinja merosot, harganja meningkat dan sulit didapat, Konferensi berpendapat bahwa semakin memburuknja keadaan ekonomi bisa menghambat kelantjaran pelaksanaan Trikora. Menghadapi keadaan² jang sedemikian, SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja tidak mungkin bersikap pasif. Konferensi menjerukan kepada segenap kaum buruh untuk melantjarkan tiga gerakan, jaitu a) mengintensifkan berbagai kegiatan kongkrit serikatburuh dibidang produksi dan distribusi, b) membantu kaum tani dalam mempertinggi produksi dan c) menggerakkan praktek produksi sendiri. Selain itu Konferensi djuga mengambil sebuah Resolusi jang menuntut supaja pembentukan Dewan² Perusahaan, Dewan² Produksi Pertanian dan Dewan² Pengawas Distribusi dengan ikutsertanja wakil² serikatburuh² dan serikattani² disegerakan.

Tuntutan² kaum buruh dan kaum tani tentang pendemokrasian pengurusan produksi dan pelaksanaan pembangunan sekarang mulai terlaksana. Musjawarah² dengan organisasi² buruh dan tani mengenai masalah² produksi dan transport mulai diselenggarakan beberapa kali oleh Pemerintah dan Front Nasional. Dewan² Perusahaan jang telah diperdjuangkan pembentukannja selama 2

tahun dan selalu dihalang-halangi pelaksanaannja oleh kaum kapitalis birokrat jang takut setengah mati terhadap kontrol Rakjat sekarang mulai diadakan. Hingga tanggal 31 Djuli 1962, djumlah Dewan² Perusahaan dipusat dan daerah jang sudah ditetapkan oleh Panitia Menteri adalah 108 buah, sedangkan jang sudah dilantik oleh Menteri jang bersangkutan baru 56 buah.

Pada bulan April 1962 telah dibentuk Badan Pembantu Wampa Produksi jang terdiri dari wakil² organisasi² buruh dan tani, termasuk wakil² SOBSI. Hingga sekarang Badan Pembantu itu baru bersidang sekali.

Pada bulan April 1962 telah dibentuk Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi jang diketuai sendiri oleh Presiden Sukarno. Dalam Staf Komando ini duduk serta sebagai anggota Saudara Mohamad Munir, Wakil Ketua Dewan Nasional SOBSI. Pada tanggal 18 Mei 1962 telah dikeluarkan Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis² Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat jang kemudian diikuti oleh instruksi² pelaksanaannja.

Duduknja wakil² dan tokoh² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI dalam badan² ekonomi jang resmi tersebut menundjukkan naiknja martabat organisasi SOBSI dalam kehidupan nasional jang ditjapai sebagai hasil² daripada aksi² massa kaum buruh, pelaksanaan politik persatuan nasional jang tepat dan bertambah kuatnja kedudukan organisasi.

Untuk membebaskan Irian Barat dan mengatasi krisis sandang-pangan, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja tiada henti²nja menuntut dan memperdjuangkan, supaja demokrasi dan kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM dilaksanakan disemua bidang. Hanja dengan adanja demokrasi bagi Rakjat, dan tidak bagi musuh² Rakjat, kegotongrojongan nasional dapat lebih diperkuat dan segenap potensi nasional dapat dimobilisasi. Tuntutan pokok kaum buruh untuk membulatkan kegotongrojongan nasional adalah pembentukan Kabinet Gotong Rojong sesuai dengan Konsepsi Presiden jang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957.

Sesudah Presiden Sukarno melakukan regruping Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Maret 1962, sekarang dalam Musjawarah Pimpinan Negara duduk tokoh² partai² politik Nasionalis, Agama dan Komunis sebagai Menteri. Diangkatnja tokoh² partai² politik mendjadi Menteri menundjukkan bahwa dalam kehidupan politik dalam negeri nampak adanja ketjenderungan kearah demokratisasi sistim pemerintahan, jang membuktikan bahwa ofensif Manipol mampu membikin kotjar-katjirnja benteng reaksi jang anti-Manipol di-mana². Kemenangan² politik lainnja daripada ofensif Manipol ini adalah dikeluarkannja Instruksi Presiden pada tanggal 7 Djuli 1962 tentang perluasan hak² demokrasi dalam waktu masih berlakunja keadaan bahaja dan mulai di-NASAKOM-kannja pimpinan² DPRDGR dibeberapa daerah.

Didjiwai oleh Manipol dan dituntun oleh pedoman² pelaksanaannja, semangat kegotongrojongan nasional bertambah hari bertambah berkembang. Meningkatnja semangat kegotongrojongan nasional telah didemonstrasikan dalam Pernjataan Kebulatan Tekad Musjawarah P.B. Front Nasional dengan Partai² dan Organisasi² Massa pada tanggal 2 Maret 1962, jang mendukung sepenuhnja pelaksanaan Trikora, memperkuat kebidjaksanaan Presiden Sukarno jang hanja mau berunding dengan Pemerintah Belanda atas dasar penjerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menuntut pensitaan semua modal Belanda.

Kesimpangsiuran dalam membangkitkan dan memobilisasi Rakjat masih sering terdjadi dengan adanja BPPK. Kesimpangsiuran itu sangat memboroskan tenaga dan biaja. Karena itu selajaknja djika semua kegiatan dalam membangkitkan dan memobilisasi Rakjat dipusatkan di Front Nasional jang sekarang telah berhasil menghimpun semua Partai dan Organisasi Massa pendukung Manipol, dengan demikian adanja BPPK tidak diperlukan lagi. Front Nasional sekarang menghimpun 10 Partai dan 268 Organisasi² Massa. Front Nasional telah merupakan satu bentuk persatuan nasional jang penting dalam kehidupan politik dinegeri kita.

Dilapangan internasional, dalam rangka memperkuat perdjuangan pembebasan Irian Barat, SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja telah berusaha se-kuat²nja untuk menggunakan hubungan² internasionalnja guna membangkitkan solidaritet kaum buruh sedunia. Pernjataan² bersama telah dibuat dengan berbagai organisasi kaum buruh di-negeri² Asia, Afrika dan Amerika Latin dan

dengan organisasi² kaum buruh Uni Sovjet, RRT dan negeri² sosialis lainnja. SOBSI telah berhasil memasukkan masalah perdjuangan pembebasan Irian Barat dalam Program Aksi Serikatburuh² Sedunia jang disahkan dalam Kongres Ke-V Serikatburuh Sedunia di Moskow pada bulan Desember 1961. GSS, satu gabungan serikatburuh sedunia jang menghimpun 120 djuta kaum buruh di-negeri² kapitalis, negeri² djadjahan, negeri² jang baru merdeka dan negeri² sosialis telah mengeluarkan seruan kepada kaum buruh sedunia untuk melakukan aksi² boikot dan aksi² lainnja jang efektif untuk mentjegah pengiriman pasukan² dan sendjata² imperialis Belanda ke Irian Barat.

Chusus kepada kaum buruh Nederland jang telah mengadakan demonstrasi² menentang pengiriman serdadu² Belanda ke Irian Barat, kepada kaum buruh Djepang jang memprotes datangnja kapal perang „Karel Doorman" ke Djepang dan menentang dipergunakannja lapangan terbang Haneda oleh KLM untuk mengangkut serdadu² Belanda ke Irian Barat dan kepada kaum buruh Australia jang dengan tegas menolak masuknja kapal-perang Belanda „Karel Doorman" kepelabuhan Freemantle, kaum buruh Indonesia menjatakan terimakasih se-besar²nja dan salut se-tinggi²nja.

Kaum buruh Indonesia beserta seluruh Rakjat Indonesia djuga menjatakan terimakasih se-besar²nja dan salut se-tinggi²nja atas bantuan² jang bersahabat dan tidak berpamrih jang telah diberikan oleh kaum buruh, Rakjat dan Pemerintah Uni Sovjet dan negeri² sosialis lainnja serta GSS dan organisasi² buruh diberbagai negeri.

Salut dan hormat se-tinggi²nja patut disampaikan oleh kaum buruh beserta seluruh Rakjat kepada geriljawan² Republik Indonesia jang dengan gagah berani telah menjabung njawa melakukan perang gerilja didaratan Irian Barat dan kepada sukarelawan² jang tiada kenal lelah memperkuat kubu² pertahanan digaris depan. Soliditet nasional selajaknja dibaktikan kepada segenap keluarga para geriljawan dan sukarelawan.

Saudara² jang tertjinta!

Demikianlah hasil² besar dibidang persatuan, organisasi dan aksi jang telah kita tjapai dalam melaksanakan „empat-tugas-besar SOBSI". Keempat tugas besar ini

berhasil kita laksanakan, karena kita tepat pada waktunja memetjahkan „tiga soal penting", jaitu soal² aksi, kader dan demokrasi. Ketiga soal penting tersebut masih perlu terus diresapkan pengertian²nja dikalangan kader² dan aktivis² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI, terutama melalui kegiatan² pendidikan.

Djerih lelah kita dalam melaksanakan „empat-tugas-besar SOBSI" selama setahun ini telah sangat membantu dalam mentjiptakan sjarat² politik dan organisasi jang lebih baik untuk ber-sama² seluruh Rakjat meneruskan ofensif Manipol dan membikin benteng reaksi jang anti-Manipol lebih kotjar-katjir lagi. Sjarat² ini adalah meluapnja semangat kegotongrojongan nasional dikalangan kaum buruh dan Rakjat jang tak terbendung lagi dan telah gagalnja serangan² reaksi jang ber-tubi² jang mentjoba membubarkan SOBSI dan mematikan demokrasi. Dengan memiliki sjarat² politik dan organisasi jang lebih baik itu apa selandjutnja jang harus kita kerdjakan? *Kerdja-pokok kita adalah masih tetap melaksanakan „empat-tugas-besar SOBSI", dengan tekanan kerdjanja pada memperkuat lebih landjut demokrasi dan kegotongrojongan nasional disemua bidang, kearah pembentukan Kabinet Gotong Rojong.* Hak² demokrasi jang lebih luas bagi Rakjat dan kegotongrojongan nasional jang lebih kuat diperlukan untuk melandjutkan perdjuangan pembebasan Irian Barat dan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri.

Dalam memperkuat demokrasi dan kegotongrojongan nasional, Pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1962 jang berdjudul *„Tahun Kemenangan"* merupakan pedoman nasional jang sangat penting. Dalam pidato pada hari jang bersedjarah, Hari 17 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Presiden Sukarno menandaskan, bahwa:

„..... Dengan Landasan RESOPIM itu kita dalam waktu jang telah ditetapkan dapat menjelesaikan persoalan-berat Keamanan dan persoalan-berat Irian Barat. Dengan Landasan RESOPIM itu kita dapat mentjapai tahun 1962 ini sebagai Tahun Kemenangan. Lihat berapa umur Manipol-USDEK-RESOPIM itu? Manipol-USDEK baru berumur tiga tahun! En toch kita dengan Landasan Manipol-USDEK dan RESOPIM itu telah mentjapai hasil jang gilang-gemilang! Satu tanda apa? Tanda bahwa Manipol-USDEK-RESOPIM ada-

lah Landasan jang Sakti! Karena itu hajo berdjalan terus!, ... biar andjing menggonggong, hajo berdjalan terus! ..... diatas Landasan Manipol-USDEK dan RESOPIM!"

SOBSI sepenuhnja mendukung seruan Presiden Sukarno itu dan menjokong Pernjataan Kebulatan Tekad Mendukung dan Melaksanakan Amanat „Tahun Kemenangan" jang diputuskan dalam Musjawarah P.B. Front Nasional dengan Partai² Politik dan Organisasi² Massa pada tanggal 23 Agustus 1962 di Djakarta. Kepada segenap anggota, aktivis dan kader SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI diserukan untuk mempeladjari dengan sungguh² Pidato Presiden Sukarno tentang „Tahun Kemenangan" dan menggunakannja sebagai pedoman dalam memperdjuangkan pelaksanaan Manipol beserta pedoman² pelaksanaannja setjara konsekwen, guna mengkonsolidasi kemenangan² nasional jang sudah ditjapai dan merebut kemenangan² baru jang lebih besar.

Dengan bantuan seluruh Rakjat, pelaksanaan Triprogram Pemerintah telah mentjapai kemenangan² nasional dibidang keamanan dan perdjuangan pembebasan Irian Barat. Jang masih dituntut oleh kaum buruh bersama seluruh Rakjat jalah ditanggulanginja soal² ekonomi dengan semangat Trikora dan berpedoman kepada Manipol serta Pola Pembangunan 8 Tahun.

Bersama seluruh Rakjat, kaum buruh Indonesia menjambut gembira dan menjokong sepenuhnja pernjataan Presiden Sukarno dalam Pidato „Tahun Kemenangan", bahwa kesulitan² ekonomi akan diatasi setelah soal keamanan dan soal Irian Barat boleh dikatakan selesai. Presiden Sukarno menandaskan, bahwa „..... *Dengan selesainja soal keamanan, dengan selesainja soal Irian Barat, maka modal kita untuk memetjahkan soal ekonomi akan sangat bertambah* ....."

Selama setahun ini, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja telah banjak mentjapai hasil² perdjuangan dibidang sosial-ekonomi. Jaitu kenaikan upah sebesar rata² 25% diseluruh lapangan kerdja untuk tahun 1961, pembajaran gratifikasi 1960 jang umumnja lebih tinggi, THR 1962 jang lebih tinggi bagi kaum buruh perusahaan² swasta, kenaikan upah antara 25%-50% untuk tahun 1962 disebagian perusahaan² negara dan swasta, perbaikan distribusi beras bagi pegawai-negeri, mulai diberikannja distribusi beras bagi pekerdja² negeri dan berhasilnja ditjegah maksud pemerintah untuk menaikkan harga distribusi beras bagi kaum buruh sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Tetapi semua perbaikan penghasilan itu mendjadi hilang artinja dengan naiknja harga barang² setjara luar biasa.

Berdasarkan keterangan Pemerintah sendiri, indeks biaja hidup di Djakarta pada achir tahun 1961 telah naik mendjadi 170% dan pada achir bulan Maret 1962 telah naik mendjadi 325%, bila dibandingkan dengan achir tahun 1960. Kenaikan harga ini djuga terdjadi di-kota² lain. Akibatnja daja beli kaum buruh terus merosot meskipun berhasil memperdjuangkan kenaikan² upah dan perbaikan² penghasilan lainnja. Untuk mentjegah kemerosotan daja beli, SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja telah melakukan kegiatan² melawan setiap usaha menaikkan harga dan tarif, memperdjuangkan kenaikan upah, termasuk pelaksanaan TKS bagi pegawai negeri, dan menuntut perbaikan distribusi pangan dengan harga rendah.

Kaum buruh dan seluruh Rakjat tidak hanja mengalami kenaikan harga jang luarbiasa, djuga menghadapi kesulitan² ekonomi lainnja, jaitu kemerosotan produksi, kematjetan transport dan distribusi, kemerosotan nilai rupiah dan matjam² hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk tahun 1962 ditaksir Pemerintah hanja mampu paling tinggi mengimport 30% daripada kebutuhan barang² baku dan penolong jang mutlak bagi normalisasi produksi dalam negeri. Salah satu akibat sosial daripada tidak normalnja keadaan produksi adalah bertambah besarnja bahaja pengangguran. SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja tidak tinggal diam menghadapi matjam² kesulitan ekonomi itu dan telah melakukan berbagai kegiatan kongkrit dibidang produksi dan distribusi. Semua kegiatan kongkrit ini sekarang perlu lebih diintensifkan untuk mentjegah makin merosotnja dajabeli dan susutnja kesempatan kerdja.

Disamping matjam² sebab ekonomis, memburuknja keadaan ekonomi dan keuangan negara adalah terutama disebabkan oleh kemerosotan produksi jang diakibatkan oleh pengurusan produksi jang tidak sehat atau mismanagement dan subversi ekonomi imperialis dan komplotannja. Karena itu djalan jang se-tepat²nja untuk mem-

perbaiki keadaan ekonomi dalam negeri adalah mempertinggi produksi, memberantas mismanagement dan melawan subversi ekonomi, bukan menaikkan harga, tarif dan padjak jang memberatkan beban penghidupan Rakjat.

Masalah mempertinggi produksi merupakan masalah nasional jang harus dipetjahkan dengan memobilisasi semua potensi nasional, terutama kaum buruh dan kaum tani sebagai tenaga2 produktif jang pokok. Tanpa ikutsertanja kaum buruh dan kaum tani tak mungkin masalah produksi terpetjahkan. Dan semua potensi nasional ini hanja dapat dimobilisasi, djika hak2 demokrasi bagi Rakjat diperluas pelaksanaannja.

Djelaslah, bahwa kita sekarang menghadapi tiga soal nasional jang kongkrit, jaitu soal2 demokrasi, produksi dan Irian Barat. Ketiga soal nasional jang kongkrit inilah jang selajaknja dipetjahkan oleh Sidang Ke-III Dewan Nasional SOBSI sekarang ini. Maka itu Laporan Umum Presidium kepada Sidang Ke-III Dewan Nasional SOBSI dipusatkan pada pembahasan soal2 demokrasi, produksi dan Irian Barat.

Perkuat Kewaspadaan Nasional.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatangani di New York Persetudjuan Indonesia-Belanda tentang penjerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari tangan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia setjara bertahap melalui pemerintahan sementara dibawah sebuah badan PBB, jaitu UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).

Pada tanggal 1 Oktober setjara resmi Bendera Belanda turun dari angkasa Irian Barat dan diganti oleh Bendera PBB. Pada tanggal 31 Desember 1962 Bendera Republik Indonesia setjara resmi dikibarkan ber-sama2 dengan Bendera PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemulangan semua tentara dan pegawai Belanda harus selesai, pemerintahan sementara PBB berachir dan kekuasaan pemerintahan sepenuhnja diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Persetudjuan Indonesia-Belanda jang menetapkan penjerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pemulangan semua tentara dan pegawai Belanda

adalah merupakan kemenangan nasional Rakjat Indonesia. Kemenangan nasional ini adalah hasil pelaksanaan diplomasi jang diabdikan kepada Trikora. Tetapi persetudjuan itu djuga mengandung pasal2 jang membuka lubang2 bagi kaum imperialis untuk melakukan pengatjauan2 politik dan militer, diantaranja ketentuan2, bahwa disamping Penguasa PBB akan mempergunakan satuan2 Angkatan Perang Republik Indonesia dan apa jang dinamakan „Polisi Papua" untuk mendjaga keamanan dan ketertiban, djuga selama pemerintahan sementara PBB akan digunakan 1.000 orang tentara asing dari Asia sebagai Pasukan2 Keamanan PBB. Selain itu ditentukan, bahwa setelah Pemerintah Indonesia mengoper pemerintahan di Irian Barat, maka dengan bantuan wakil PBB beserta stafnja akan diadakan pilihan untuk menetapkan apakah Rakjat Irian Barat akan tetap dalam kesatuan Indonesia ataukah memisahkan diri dari Indonesia. Mengenai soal2 ekonomi ditentukan, bahwa UNTEA akan mengoper kewadjiban2 Belanda berkenaan dengan konsesi2 dan hak2 milik. Setelah mengoper pemerintahan di Irian Barat, Pemerintah Indonesia akan menghormati kewadjiban2 Belanda tersebut sepandjang hal2 itu tidak bertentangan dengan kepentingan2 dan perkembangan ekonomi dari penduduk Irian Barat dan sebuah komisi bersama Indonesia-Belanda akan dibentuk untuk mempeladjari sifat dari pada konsesi2 dan hak2 milik tersebut.

Adalah tepat sekali apa jang diperingatkan oleh Presiden Sukarno dalam Pidato „Tahun Kemenangan", jang menandaskan :

„Maka sementara itu kami dari fihak Indonesia terpaksa tetap waspada, tetap dalam posisi perdjuangan, tetap dalam „stelling", tetap dalam Trikora, tetap sampai ada kenjataan2 jang njata, bahwa ini kali persetudjuan Indonesai-Belanda itu benar2 dilaksanakan setjara djudjur, dan tidak ala Renville dan Linggardjati .....". Sebagaimana telah kita alami bersama persetudjuan2 Linggardjati dan Renville itu digunakan oleh kaum imperialis Belanda untuk mempersiapkan agresi2 militernja terhadap Rakjat dan Republik Indonesia.

Bukan rahasia lagi, bahwa imperialis Amerika Serikat melalui usul-Bunker dan kegiatan Presiden Kennedy turut tjampurtangan dalam penjelesaian masalah Irian Barat. Rakjat2 sedunia telah mengenal politik agresif

Presiden Kennedy jang mengantjam kemerdekaan nasional Kuba, mempertahankan pendudukan militernja di Taiwan, Djepang dan Korea Selatan, mendaratkan pasukan² Amerika Serikat di Muangthai jang mengantjam kemerdekaan dan kenetralan Laos serta perdamaian di Indo-Tjina, membentuk komando militer untuk menindas perdjuangan kemerdekaan Rakjat Vietnam Selatan; menggunakan Bendera PBB untuk melaksanakan neo-kolonialisme di Kongo, menghidupkan militerisme Djerman Barat dan mentjoba menguasai negeri² Eropa Barat melalui Pasaran Bersama Eropa, dan pada waktu achir² ini tanpa memperdulikan protes² Rakjat² sedunia melandjutkan pertjobaan² bom nuklir. Semua kenjataan ini membuktikan bahwa kita tidak bisa meng-harap²kan kebaikan apa² dari imperialis Amerika Serikat. Rakjat Indonesia sendiri tidak akan melupakan „peristiwa Pope" dan rentjana pendaratan tentara Amerika Serikat di Pakan Baru dengan alasan untuk melindungi hak milik warganegara Amerika pada waktu petjahnja pemberontakan kontra-revolusioner PRRI/Permesta pada permulaan tahun 1958. Maka itu kewaspadaan nasional dalam melandjutkan perdjuangan pembebasan Irian Barat harus dipertinggi terhadap bahaja neo-kolonialisme atau pendjadjahan imperialis dalam badjubaru. Tiap hasil perdjuangan pembebasan Irian Barat adalah karena pelaksanaan Trikora dan kegotongrojongan nasional jang diperkuat oleh solidaritet kaum buruh sedunia, bantuan² negeri² sosialis jag dipelopori oleh Uni Sovjet dan seluruh kekuatan "the new emerging forces" di Asia, Afrika, Amerika Latin dan seluruh dunia.

Dalam pesannja kepada Kongres Perlutjutan Sendjata pada permulaan bulan Djuli 1962 di Moskow, Presiden Sukarno telah memperingatkan tentang adanja kolonialisme klasik dan neo-kolonialisme. Gerakan serikatburuh se'unia telah menjimpulkan pengalaman²nja mengenai praktek² daripada neo-kolonialisme. Program Aksi Serikatburuh jang disahkan oleh Kongres Ke-V Serikatburuh Sedunia menjatakan bahwa:

„Kaum kolonialis tidak akan menjerah setjara sukarela. Apalagi menghadiahkan kemerdekaan kepada bangsa² dan Rakjat² jang tertindas. Apa jang mereka lakukan adalah mentjiptakan bentuk² baru daripada kolonialisme.

Kaum buruh di-negeri² jang baru merdeka, tidak hanja

harus menghantjurkan bentuk² kolonialisme jang lama di-lapangan militer, politik dan ekonomi, djuga harus mengalahkan kolonialisme jang muntjul dalam bentuk² baru. Melalui tjampurtangan finansiil, persetudjuan² dagang dan apa jang dinamakan rentjana² perkembangan ekonomi, kaum monopoli mentjoba mengontrol ekonomi dan menguasai bahan² mentah jang pokok serta pasar dalam negeri dari negara² jang baru merdeka itu untuk mempertahankan dominasi mereka dan terus mentjengkeram negara² itu dalam kekuasaan modal asing."

Selandjutnja Program Aksi Serikatburuh menandaskan, bahwa untuk melaksanakan neo-kolonialisme, kaum imperialis selalu berusaha membentuk pemerintahan² boneka dan menggunakan kekerasan² reaksioner untuk menindas gerakan kemerdekaan nasional.

Dewan Setiakawan Rakjat² Asia-Afrika jang berkonferensi di Bandung dalam bulan April 1961 menjatakan antara lain, bahwa *„neo-kolonialisme adalah suatu bentuk baru dari imperialisme, terutama imperialisme Amerika Serikat"* dan bahwa neo-kolonialisme adalah *„bentuk penguasaan jang tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer dan tehnik"*.

Dalam melaksanakan neo-kolonialisme, imperialis Amerika Serikat paling gemar menggunakan PBB sebagai kedoknja sebagaimana dialami oleh Rakjat² Korea dan Kongo. Telah tjukup terbukti bahwa dalam prakteknja apa jang dinamakan kekuasaan PBB adalah kekuasaan imperialis Amerika Serikat. Karena itu selama pemerintahan sementara PBB, geriljawan² Republik Indonesia didaratan Irian Barat tentu akan mengalami banjak kesulitan dalam menghadapi tentara Belanda jang tidak segera pergi, aparat² kolonial peninggalan Belanda, tentara asing jang ditempatkan dibawah PBB dan penjelundupan² kekuatan² reaksioner jang didatangkan lewat saluran² PBB. Semua kesulitan itu dapat diatasi, djika Trikora berdjalan terus, geriljawan² kita diberi tempat jang se-baik²nja selama kekuasaan PBB di Irian Barat dan selandjutnja diberi prioritet dalam menempati kedudukan² sivil atau militer di Irian Barat dan djika pedjabat² Republik Indonesia jang bertugas di Irian Barat terdiri dari orang² revolusioner jang teguh membela kepentingan² geriljawan² kita dan kepentingan² Republik Indonesia.

Pengalaman² perdjuangan kemerdekaan nasional Rakjat² Asia, Afrika dan Amerika Latin telah tjukup membuktikan, bahwa neo-kolonialisme itu bukan tanda kuatnja, tapi tanda lemah dan meruntuhnja sistim imperialis, baik setjara ekonomi maupun politik. Program Aksi Serikatburuh telah menjimpulkan, bahwa kehantjuran total dari kolonialisme dalam bentuk lama ataupun baru adalah tak terhindarkan lagi dalam menghadapi gelombang kebangkitan nasional Rakjat² sedunia jang tak mungkin dibendung lagi. Presiden Sukarno menjatakan dalam Pidato „Tahun Kemenangan", bahwa „..... *Tiap perdjuangan menentang kolonialisme achirnja akan dimenangkan oleh fihak pedjoang Kemerdekaan, oleh karena djalannja Sedjarah menghendaki kemenangan fihak kemerdekaan itu*".

Perluas Demokrasi bagi Rakjat.

Pada waktu achir² ini, didorong oleh meningkatnja semangat kegotongrojongan nasional dalam melaksanakan Trikora, dalam kehidupan demokrasi dinegeri kita terdapat kemadjuan² tertentu, jang menundjukkan adanja ketjenderungan kearah demokratisasi sistim pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemadjuan² itu adalah dikeluarkannja Instruksi Presiden tentang perluasan demokrasi, ditjabutnja kembali RUU Pemilihan Umum jang sangat memalukan, karena tidak demokratis dan dibentuknja satu Panitia Negara dengan ikutsertanja tokoh² partai dan organisasi² massa, mulai di-NASAKOM-kannja pimpinan DPRD-GR dibeberapa daerah dan mulai diikutsertakannja para anggota BPH dan pimpinan DPRD-GR dalam penjelenggaraan pemerintahan daerah, mulai diikustertakannja wakil² kaum buruh dan kaum tani dalam penjelenggaraan produksi melalui Dewan² Perusahaan dan duduknja tokoh² partai² NASAKOM dalam Musjawarah Pimpinan Negara dan sebagai Menteri.

Kemadjuan² itu adalah pertanda baik dalam kehidupan nasional jang membuktikan bahwa situasi politik dalam negeri terus bergeser kekiri. Tetapi kaum buruh dan Rakjat Indonesia telah tjukup mempunjai pengalaman² jang pahit tentang kematjetan², bahkan penjelewengan², tidak hanja dalam pelaksanaan per-undang²an dan per-

aturan² pemerintah jang baik bagi Negara dan Rakjat, djuga dalam pelaksanaan garis² besar haluan negara. Salah satu pengalaman pahit adalah tidak sedikit pedjabat² sivil ataupun militer di-daerah² jang bertindak menjimpang dari Instruksi² Presiden dan Pemerintah. Mengenai kematjetan² dan penjelewengan² ini Presiden Sukarno dalam RESOPIM telah memperingatkan. bahwa: „..... *Demokrasi Terpimpin kita itu tegas-njata mempunjai dua unsur: unsur „demokrasi" dan unsur „Terpimpin"*, bahwa, ... *demokrasi tok bisa menjeleweng ke-liberalisme, terpimpin tok bisa menjeleweng kediktatur fasis"*, dan bahwa: „..... *Bukan militer atau bedil jang memimpin Manipol, tetapi Manipol jang memimpin militer atau bedil"*. Lebih landjut Presiden Sukarno menandaskan dalam Pidato „Tahun Kemenangan", bahwa masih terlalu banjak instruksi² dan tindakan² Presiden jang ditudjukan untuk memobilisasi, mempersatukan dan mengikutsertakan kekuatan² Rakjat jang revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh², atau malahan diam² kadang² „didjegal" atau „disrimpung" oleh alat² negara sendiri". Dalam suratkabar² telah diumumkan, bahwa DPA dalam sidangnja pada tanggal 4-5 Djuli 1962 telah mempertimbangkan kepada Pemerintah, agar supaja tiap Instruksi dan Amanat Presiden segera dilaksanakan oleh para pedjabat baik sivil maupun militer tanpa menunggu adanja instruksi atas dasar saluran administrasi dan supaja Pemerintah mengandjurkan kepada seluruh lapisan masjarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Instruksi² dan Amanat² tersebut dengan mengadjukan pendapat²nja melewati saluran² alat negara, Front Nasional, partai² dan organisasi² massa lainnja.

Sumber pokok daripada kematjetan² dan penjelewengan² itu adalah karena belum dilaksanakannja rituling alat² negara sebagaimana dinjatakan dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannja. Rituling alat² negara ini diperlukan, tidak hanja untuk mendorong madju demokrasi, jang berarti mendorong madju kegotongrojongan nasional, djuga untuk mendorong madju produksi, jang berarti memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri.

Rituling jang kita perdjuangkan adalah rituling jang demokratis sesuai dengan Ketetapan MPRS II, Lampiran A, Bidang Pemerintahan Dan Keamanan/Pertahanan,

jang menentukan tentang „rituling badan² eksekutif, judikatif dan legislatif dari atas sampai kebawah dengan djiwa dan semangat „Djalannja Revolusi Kita" untuk mentjiptakan Pemerintah jang a) Stabil dan berkewibawaan, b) Mentjerminkan kehendak Rakjat, c) Revolusioner dan d) Gotongrojong". Untuk mendjamin pelaksanaan rituling alat² negara jang sesuai dengan Ketetapan MPRS, selajaknja dalam Panitia² Negara untuk rituling alat² negara diikutsertakan tokoh² partai² dan organisasi² massa dan jang mentjerminkan persatuan NASAKOM. Panitia² rituling hendaknja diperluas sampai kedepartemen², djawatan² dan perusahaan² negara. Mendemokratiskan komposisi keanggotaan Panitia² Rituling adalah sangat perlu untuk mentjegah, djangan sampai orang² jang seharusnja diritul, malahan meritul.

Rintangan pokok pada waktu sekarang dalam pelaksanaan pendemokrasian pemerintahan dan penjelenggaraan pembangunan adalah karena kaum kapitalis birokrat belum „minggir atau dipinggirkan" dari kedudukan²-nja jang penting di-alat² negara. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun ini dapat disimpulkan, bahwa kaum kapitalis birokrat, jalah mereka jang mendjadi kapitalis dengan menggunakan kedudukannja dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara atau hubungannja dengan pembesar² dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara. Mereka menggunakan birokrasi, dan sekarang terutama menjalahgunakan UUKB untuk mendapatkan dan memperkuat posisinja sebagai kapitalis. Sama dengan kaum komprador, jaitu agen² modal monopoli asing, mereka adalah anti-demokrasi, anti-organisasi Rakjat, dan anti-kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM, berusaha mempererat hubungan ekonomi, politik dan militer dengan negeri² imperialis serta bekerdjasama dengan tuantanah² untuk menindas kaum tani. Seperti halnja kaum imperialis, tuantanah dan burdjuis-komprador, kaum kapitalis birokrat merupakan kekuatan reaksioner jang anti-Manipol. Mereka adalah musuh² Rakjat Indonesia.

Memperdjelas tjiri² pokok kaum kapitalis birokrat ini adalah sangat penting untuk mentjegah salah sasaran dalam memperdjuangkan rituling alat² negara. Sidang Ke-II Dewan Nasional SOBSI telah menjimpulkan, bahwa tidak semua pedjabat itu reaksioner, diantara mereka

ada jang tergolong kaum reaksioner jang menentang Manipol, ada jang tidak tergolong kaum reaksioner, tetapi bersifat birokratis dan ragu² mendjalankan Manipol dan tidak sedikit jang demokratis jang konsekwen Manipol. Jang kita perdjuangkan supaja „minggir atau dipinggirkan" adalah mereka jang reaksioner, jaitu kaum kapitalis birokrat dan anasir² reaksioner lainnja jang mendjadi agen² imperialis asing dan tuantanah². Terhadap golongan² jang ragu² mendjalankan Manipol, sikap kita adalah bersatu, mengkritik, mendidik dan mendorong madju.

Tuntutan² pokok SOBSI dalam memperdjuangkan rituling alat² negara adalah pendemokrasian penjelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembulatan kegotongrojongan nasional melalui pembentukan Kabinet Gotongrojong dan pentjabutan keadaan bahaja serta penindjauan kembali UUKB jang berlaku sekarang. Semuanja ini adalah untuk mendjamin, supaja gagasan Demokrasi Terpimpin berdjalan dengan normal, tidak diselewengan „ke-liberalisme" atau „kediktatur fasis" sebagaimana ditjanangkan oleh Presiden Sukarno dalam Re-So-Pim.

Masalah rituling alat² negara adalah masalah nasional. Karena itu, tuntutan² pokok tersebut harus diperdjuangkan ber-sama² dengan semua kekuatan nasional jang pro-Manipol, dimana kaum buruh harus mengambil peranan jang aktif, tanpa mengendorkan tuntutan² dan kegiatan² praktis. Jaitu terus memperdjuangkan pelaksanaan Instruksi Presiden tentang perluasan demokrasi, terus mengurus dan membela kaum buruh dan pemimpin² serikatburuh jang diproses-verbal, dimasukkan tahanan atau diadjukan kemuka pengadilan, terus memperbaiki pekerdjaan grup² pembelaan, terus mengorganisasi aksi² solidaritet, terus mengurus penerbitan „BENDERA BURUH" dan madjalah² serikatburuh, terus menggagalkan praktek² anti-demokrasi dari PTK, Perkapen dll.nja.

Pendemokrasian penjelenggaraan produksi sekarang mulai dilaksanakan melalui musjawarah² dan Dewan² Perusahaan. Pada pokoknja pelaksanaan prinsip „ikutsertakan seluruh pekerdja dalam memikul tanggung-djawab dalam produksi dan alat² produksi" sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Sukarno mulai dapat kemenangan. Tetapi pelaksanaannja lebih landjut masih harus

diperdjuangkan, tidak hanja karena kaum kapitalis birokrat akan terus pasang kuda² untuk menghalang-halanginja, djuga masih tidak sedikit djumlah pedjabat² jang dihinggapi oleh apa jang oleh Presiden Sukarno dinamakan dalam RESOPIM sebagai „semangat routine, amtenarisme, ndoroisme, sumuhun dawuhisme". Pembentukan Dewan² Perusahaan dibeberapa perusahaan negara dan sampai ke-tempatkerdja² masih harus diperdjuangkan. Diberbagai lapangan kerdja pembentukan Dewan² Perusahaan tidak lantjar. Tepat sekali pernjataan Presiden Sukarno, bahwa pembentukan Dewan² Perusahaan „djalannja seperti keong". Djuga masih harus diperdjuangkan pelaksanaan Instruksi Presiden Sukarno tentang pembentukan Dewan² Pertimbangan dan Pengawas Pengumpulan Padi serta Distribusi Beras dengan ikutsertanja organisasi² massa buruh, tani dan organisasi² lainnja jang bersangkutan dengan pengumpulan padi dan distribusi beras. Dewan² Pembangunan Daerah, jang peranannja bertambah penting berhubung dengan dikeluarkannja UU No. 5/1962 tentang Perusahaan² Daerah, baru berhasil dibentuk dibeberapa daerah dengan ikutsertanja wakil² SOBSI. Sedjalan dengan pembentukan Dewan² Perusahaan, serikatburuh² pegawai negeri sekarang sedang menuntut pembentukan Dewan² Pertimbangan di-departemen² dan djawatan². Wakil² serikatburuh² pegawai negeri telah ikutserta dalam badan² pimpinan Dispri jang dibentuk dipusat dan di-daerah² Daswati I dan II. Setelah berhentinja Menteri P.O.R. Sudjono kedudukan Dispri sekarang tidak djelas. Tuntutan² kaum buruh dan kaum tani tentang Dewan² Produksi Pertanian dan Dewan² Pengawas Distribusi hingga sekarang belum berhasil.

Tentang sebab² jang menimbulkan kematjetan² dan kelambatan² dalam pelaksanaan pendemokrasian pengurusan produksi, Presiden Sukarno dalam pidato „Tahun Kemenangan" telah memberikan djawabannja, jaitu „..... Semuanja ini djika diteliti sebab²nja, akan terbukti bahwa jang mendjadi penghalang ialah Komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, dan sebagainja! Sipenderita penjakit ini takut membentuk Dewan² Perusahaan, Dewan² Produksi, demikian pula Dewan² Distribusi dan Panitia Pembelian Padi, dan lain sebagainja, karena mereka tahu bahwa djika ini dibentuk, maka akan

berarti mengangkat dan mengikutsertakan wakil² buruh atau tani, dan diantaranja terdapat orang² Komunis jang mereka takuti". Selandjutnja Presiden Sukarno menjatakan, bahwa „*Untuk lantjarnja pelaksanaan program ekonomi (antara lain sandang-pangan, maka perlulah kita-benar² menjingkirkan beberapa penjakit. Diantara penjakit² itu, jang terpokok ialah terlalu parahnja penjakit Komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon didalam hati dan kepala setengah alat² negara jang bersangkutan .....*".

Pertinggi Produksi Dan Perkuat Sektor Pertanian Dan Perkebunan

Mengenai Dewan² Perusahaan jang sudah dilantik dan mulai bekerdja, jang per-tama² harus diusahakan jalah mentjegah usaha² mengurangi hak² dan kewadjiban² Dewan dan Anggota Dewan. Pegangan pokok kita adalah Manipol dan pedoman² pelaksanaannja jang telah digariskan oleh Presiden Sukarno dan telah mendjadi Ketetapan² MPRS sebagai garis² besar haluan negara. Dalam „Djarek" ditegaskan, bahwa „..... *disemua perusahaan² Negara, disemua PT² Negara, dibentuk dewan², jang berkewadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitet dan kwalitet produksi ,dan untuk mengawasi kaum pentjolengan², kaum koruptor², kaum penipu², kaum pentjuri² kekajaan negara!*" Dalam RESOPIM diperingatkan, bahwa „*Ingat, produksi, ekonomi, adalah perutnja Negara. Maka itu djamak lumrahlah kalau kaum reaksioner mengkonsentrasikan sabotase²nja kepada perut Negara ini. Ketjuali itu, orang² baru jang ditugaskan, sering kurang betjus, atau tak mengerti apa² tentang Konsepsi, atau ada djuga jang menderita penjakit „tiga si", jaitu „tjari promosi, birokrasi, korupsi*" ....." Djelaslah bahwa jang pertama² harus dipetjahkan bersama dalam Dewan² Perusahaan adalah masalah² produksi, mismanagement dan sabotase ekonomi, bukan melegalisasi kenaikan ongkos produksi, kenaikan harga dan tarif, import beras sendiri, barter sendiri, dan soal² lainnja jang berakibat lebih merusak lagi kedudukan perusahaan² negara dimata Rakjat dan mengurangi djaminan sosial kaum buruh.

Wakil² Serikatburuh²-Anggota-SOBSI dalam Dewan²

Perusaaan harus mendjadi elemen jang aktif dalam mempersoalkan masalah² produksi, mismanagement dan sabotase ekonomi. Wakil² Serikatburuh²-Anggota-SOBSI harus mendjadi wakil² kaum buruh jang tjakap dan revolusioner dengan djalan menguasai isi dan semangat dokumen² MPRS, Manipol dan pedoman² pelaksanaannja, bekerdja berdasarkan rentjana-kerdja jang disusun setjara kolektif oleh badan²-pimpinan organisasinja masing² dan mengadakan penjelidikan² dan pemeriksaan² mengenai soal² produksi, ekonomi dan keuangan, terutama dengan djalan berhubungan erat dan berunding dengan kaum buruh dilapangan kerdjanja masing² serta mengusahakan kontak² persatuan se-lnas²nja dengan berbagai golongan jang dipandang dapat menjumbangkan fikiran dan pengalaman, termasuk kaum intelektuil jang banjak sangkutpautnja dengan kaum buruh.

Masalah produksi merupakan masalah nasional. Karena itu rentjana-kerdja jang harus dilaksanakan oleh wakil² Serikatburuh²-Anggota-SOBSI di Dewan² Perusahaan harus didiskusikan bersama dengan badan² pimpinan SOBSI jang bersangkutan.

Mengapa kita harus mempersoalkan masalah produksi? Adalah tepat sekali kesimpulan Konferensi Nasional SOBSI untuk Mempertinggi Produksi Dan Melantjarkan Distribusi Pangan pada achir bulan Maret 1962 di Djakarta jang menjatakan, bahwa menghadapi keadaan ekonomi jang makin memburuk, SOBSI dan Serikatburuh-Anggotanja tidak mungkin bersikap pasif. Bersikap pasif berarti membiarkan penderitaan kaum buruh dan Rakjat terus menuntjak mendjadi korban pentjolengan² kaum kapitalis birokrat dan komplotannja. Bersikap pasif berarti membiarkan merosotnja daja-djuang Rakjat Indonesia jang sekarang ini dibawah pimpinan Presiden Sukarno sedang melawan imperialisme dan kolonialisme. Dan djalan jang se-tepat²nja untuk memperbaiki keadaan ekonomi adalah mempertinggi produksi, jang oleh Presiden Sukarno disebut sebagai perutnja Negara.

Pengalaman² telah tjukup membuktikan, bahwa kesulitan² keuangan negara tidak mungkin diatasi tanpa memperbaiki keadaan produksi jang mendjadi dasar perkembangan ekonomi. Menambah pemasukan keuangan negara hanja dengan meng-hitung², berapa „ongkos produksi, harga pendjualan dan tarif dinaikkan", dan hanja

mengambil tindakan moneter se-mata² seperti „main tjetak uang" dengan membiarkan inflasi terbuka, semuanja ini hanjalah lebih meruwetkan keadaan ekonomi dan menambah berat beban penghidupan Rakjat. Pada dasarnja keadaan ekonominja jang menentukan keadaan keuangan, bukan tindakan moneter jang dapat mengatasi krisis keuangan sekarang. Maka itu SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja akan terus melawan setiap usaha menaikkan harga dan tarif barang² dan djasa² jang menjangkut kebutuhan pokok Rakjat se-hari² dan hanja membenarkan deficit-spending bagi kegiatan² produktif jang segera menghasilkan. SOBSI menjokong apa jang dinjatakan dalam Lampiran V Anggaran Pendapatan dan Belandja negara tahun 1962 jang disahkan oleh DPR-GR jang antara lain menjatakan, supaja tiap² kenaikan harga dan tarif jang menjangkut penghidupan Rakjat banjak supaja diatur dengan Undang², supaja penggunaan APB 1962 lebih mengutamakan/menitikberatkan pada objek² jang benar² produktif terutama sandang-pangan dan objek² jang benar² akan menghasilkan dalam waktu singkat; supaja diadakan rituling dilingkungan perusahaan² negara, baik dibidang organisasi dan personalia maupun mental dll.nja.

Bukan kali ini sadja SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI mempersoalkan masalah produksi. Program Tuntutan SOBSI *„Untuk Sandang-Pangan Dan Demokrasi"* jang disahkan oleh Kongres Nasional Ke-III SOBSI pada achir bulan Agustus 1960 memuat tuntutan² untuk „Perluas Produksi Dalam Negeri Dan Laksanakan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Jang Menguntungkan Indonesia". Untuk memperluas produksi dalam negeri, Program Tuntutan SOBSI tersebut menjatakan:

„Plan pembangunan supaja ditudjukan untuk mengachiri sifat ketergantungan Indonesia pada negara² imperialis, melikwidasi kekuasaan ekonomi Belanda, menggerowoti kekuasaan modal asing lainnja dan sisa² peninadasan feodal, mengembangkan ekonomi-sektor negara, melindungi industri partikelir nasional, memperluas kesempatan kerdja untuk setjara ber-angsur² mengurangi djumlah pengangguran, menstabilisasi harga barang² kebutuhan hidup jang pokok dan memperbaiki taraf hidup Rakjat Indonesia".

Tuntutan ekonomi ini mendjadi pedoman umum SOB-

SI dalam membantu pemerintah mempertinggi produksi. Berdasarkan tuntutan ekonomi itu, maka SOBSI menjokong sepenuhnja Pola Pembangunan 8 Tahun jang ditetapkan oleh MPRS, jang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal dan ditudjukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia kepada negara² imperialis dengan mengusahakan swa-sembada sandang-pangan dan memadjukan industri dalam negeri.

Pada tanggal 18 Mei 1962, Presiden Sukarno selaku Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi telah memberikan Amanat Tentang Garis² Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat, jang antara lain menetapkan untuk memperhebat produksi bahan makanan untuk konsumsi dalam negeri dan memperhebat produksi pertanian, hasil industri dan pertambangan untuk memperbesar eksport guna menambah devisen negara. Djuga ditetapkan untuk melantjarkan aparat komunikasi dan distribusi, pelaksanaan landreform dan koperasi serta penggunaan semua "funds and forces".

SOBSI mendukung sepenuhnja Komando Ekonomi Presiden tersebut untuk memperhebat produksi bahan² makanan dan produksi bahan² eksport. Untuk melaksanakan Komando Ekonomi ini, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota-SOBSI akan melandjutkan tiga gerakan untuk mempertinggi produksi dan melantjarkan distribusi pangan [a) mengintensifkan berbagai kegiatan kongkrit serikatburuh dibidang produksi dan distribusi, b) membantu kaum tani dalam mempertinggi produksi pangan dan c) menggerakkan praktek produksi sendiri] dengan *poros kegiatannja ditudjukan untuk memperkuat produksi pertanian dan perkebunan, bersamaan dengan itu melantjarkan pengangkutan dan perhubungan didarat, laut dan udara serta memadjukan industri dalam negeri.*

Mengapa memperkuat produksi pertanian dan perkebunan harus mendjadi poros kegiatan kita? Sektor pertanian adalah jang menghasilkan bahan² makanan, bahan² mentah bagi industri seperti tebu untuk pabrik² gula, kopra untuk pabrik² minjak kelapa dsb.nja, sedangkan sektor perkebunan adalah jang menghasilkan bahan² eksport jang utama, dengan demikian mendjadi sumber devisen negara jang utama. Persoalan pokoknja jalah

supaja devisen negara itu digunakan setjara tepat dan efektif untuk melakukan pembangunan rehabilitasi, melantjarkan pengangkutan dan perhubungan dan memadjukan industri dalam negeri termasuk pembangunan industri² baru dan pengolahan sumber² alam jang kaja raja seperti pertambangan dan kehutanan. Selain itu sektor pertanian perlu diperkuat adalah untuk mempertinggi djajabeli kaum tani melalui pelaksanaan undang² perdjandjian bagihasil dan landreform. Kaum tani adalah merupakan bagian terbesar dari Rakjat Indonesia, dengan demikian merupakan pasaran jang besar bagi perkembangan industri dalam negeri. *Pada pokoknja kita harus memperdjuangkan supaja pertanian dan perkebunan mendjadi basis daripada perkembangan ekonomi nasional dengan industri sebagai tulangpunggungnja. Tanpa basis jang kuat tidak mungkin ada tulangpunggung jang kuat.*

Pada waktu sekarang sektor pertanian dan perkebunan hendaknja diperkuat untuk dapat memenuhi usaha² swasembada pangan dan sandang serta mengembangkan pembangunan industri dalam negeri menudju kemerdekaan ekonomi nasional Indonesia. Dengan demikian kita melawan usaha² kaum imperialis dan komplotannja jang mentjoba mendjadikan perkebunan hanja se-mata² sebagai sumber bahan² mentah dan menghalang-halangi kemadjuan industri dalam negeri, untuk membikin keadaan ekonomi tetap terbelakang dan tetap tergantung kepada negeri² imperialis.

Semua kegiatan² kita didalam dan diluar Dewan² Perusahaan hendaknja disesuaikan dengan poros kegiatan kita dibidang produksi tersebut. Peranan pimpinan dari SOBSI dibidang aksi² untuk produksi dan ekonomi perlu diperbaiki dengan memperkuat biro² dan bagian² pembangunan ekonomi. Kegiatan² pokok SOBSI adalah membantu Serikatburuh-Anggota-SOBSI menjusun rentjana² kerdja, mengontrol dan menjimpulkan pelaksanaannja setjara periodik dan menjelenggarakan serta membantu kursus² ekonomi bagi kader² dan aktivis² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI. Sumber pokok pengetahuan kita adalah tetap pengalaman dan ketjerdasan massa kaum buruh sendiri, karena kita tetap menegang teguh prinsip massal, prinsip „aksi² dari massa, oleh massa dan untuk massa".

Kebulatan tekad kita untuk mendorong madju pro-

duksi mentjerminkan sekali lagi sikap klas buruh jang patriotik, jaitu dalam tingkat perdjuangan nasional dan demokratis sekarang ini senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap membela kepentingan klas dan kebebasan organisasi. Ini berarti, bahwa dalam mendorong madju produksi, kita tetap memperdjuangkan prinsip jang masuk akal jang selama ini kita adjukan, jaitu: nasib buruh dalam djaman merdeka harus lebih baik daripada djaman pendjadjahan dan nasib buruh diperusahaan² jang diambil-alih harus lebih baik daripada sebelum diambil-alih. Prinsip ini adalah sesuai dengan apa jang dinjatakan oleh Presiden Sukarno dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka", bahwa „Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup lajak dan sempurna". Maka itu aksi² sosial-ekonomi jang menguntungkan kaum buruh dan dipandang adil oleh Rakjat, sekedjap matapun tidak boleh dikendorkan.

Perbaiki tjara memimpin

Saudara² jang tertjinta!

Pekerdjaan kita bertambah hari bertambah besar. Dan tidak sedikit kesulitan dan rintangan jang harus kita atasi. Karena itu kemampuan organisasi perlu terus-menerus dipertinggi. Dalam hal ini peranan perluasan pendidikan dan perbaikan tjara memimpin adalah sangat menentukan.

Kerdja pokok kita dibidang organisasi adalah melaksanakan Plan 3 Tahun SOBSI jang dititikberatkan kepada 3 matjam kegiatan, jaitu: 1. perluasan anggota, 2. perluasan pendidikan dan 3. perbaikan keuangan. Poros daripada kegiatan plan ini adalah perluasan pendidikan.

Plan 3 Tahun SOBSI merentjanakan untuk mendidik 150.000 aktivis² organisasi-basis. Plan pendidikan ini merupakan plan pendidikan politik setjara massal. Makin banjak aktivis jang terdidik, makin meluap gelombang perluasan anggota dan makin lantjar pemasukan keuangan, karena aktivis² organisasi-basis adalah pemimpin² organisasi jang setiap hari langsung berhubungan dengan kaum buruh di-tempatkerdja².

Sesuai dengan perkembangan organisasi dan tingkat perdjuangan nasional dewasa ini, maka tudjuan pokok

daripada pendidikan politik setjara massal itu jalah mendidik para aktivis untuk „tahu aksi, tahu produksi, tahu organisasi dan tahu revolusi". Semuanja ini berarti membulatkan pengertian dan menambah pengetahuan tentang garis aksi SOBSI, perlunja mempersoalkan produksi, pentingnja plan organisasi, gunanja ketentuan² organisasi dan memahami sifat Revolusi Indonesia jang nasional dan demokratis dan berhari-depan Sosialisme.

Pekerdjaan SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja dikalangan kaum buruh wanita sekarang berkembang madju. Kita telah mengenal keberanian dan ketangkasan aktivis² buruh wanita dalam memimpin aksi² massa. Semangat mereka sekarang adalah ingin madju terus dan tidak mau ketinggalan dalam kehidupan organisasi. Mereka terus bergulat menghadapi matjam² kesulitan sosial. Maka chusus bagi aktivis² buruh wanita, hendaknja ditjarikan berbagai djalan, supaja mereka djuga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan, dimana perlu diadakan pendidikan tersendiri. Kegiatan penting lainnja jang harus dibantu adalah mensukseskan persiapan Konferensi Internasional Buruh Wanita jang untuk kedua-kalinja akan diselenggarakan oleh G.S.S. pada bulan Mei 1963 j.a.d.

Untuk tahun 1962, tugas kita adalah mentjapai 60% djatah² Plan 3 Tahun SOBSI. Untuk dapat memenuhi djatah plan tahun 1962, telah ditentukan tindakan² organisasi sebagai berikut:

1. Didjalankannja dengan konsekwen garis kombinasi aksi dengan plan organisasi dan pendidikan sampai di-organisasibasis²;
2. Melengkapi dan mengaktifkan panitia² dan petugas² plan sampai di-organisasibasis²;
3. Dilaksanakannja Kursus Kader Plan jang mempersendjatai petugas² dan anggota² panitia plan tentang pengertian dan tentang tjara² pelaksanaan plan, dan
4. Dilaksanakannja tjara-kerdja dengan program triwulanan mengenai aksi dan organisasi sampai di Pimpinan Tjabang SOBSI atau Pimpinan Daerah Serikatburuh.

Kuntji penjelesaian Plan 3 Tahun SOBSI tetap terletak di SOBSI Tjabang. Pengalaman² telah menundjukkan, bahwa bersamaan dengan usaha² memperkuat Pim-

pinan Tjabang SOBSI, adalah sangat penting untuk terus memperkuat serikatburuh² transport dan membagi kerdja menggarap setjara chusus beberapa serikatburuh atau lapangan kerdja atau golongan kaum buruh tertentu, seperti membantu pertumbuhan serikatburuh nelajan, meneruskan perluasan keanggotaan dikalangan pekerdja² betjak, buruh harian lepas dilapangan agraria dll.nja.

Mensukseskan plan pendidikan dikalangan aktivis² organisasi-basis merupakan langkah perbaikan organisasi dari bawah setjara besar²an. Bersamaan dengan itu perlu diambil langkah perbaikan organisasi dari atas, jaitu memperbaiki tjara memimpin. Perbaikan tjara memimpin harus dilakukan dengan sekuat tenaga dan sepenuh-djiwa, karena dengan pimpinan jang lebih baik, semua kegiatan organisasi akan berdjalan dengan lebih lantjar.

Masalah memperbaiki tjara memimpin bukan merupakan masalah baru. Telah berulang kali kita melakukan usaha² untuk memperkuat badan² pimpinan organisasi. Salah satu hasilnja jang penting adalah suksesnja Kongres² Serikatburuh dan Konferensi² SOBSI jang telah dilangsungkan selama setahun ini. Pada umumnja kita telah memiliki satu pengertian tentang prinsip² tjara memimpin, jaitu *memadukan seruan² umum dengan tuntunan kongkrit serta memadukan pimpinan dengan massa.* Persoalan pokoknja jang harus dipetjahkan jalah bagaimana prinsip² tjara memimpin itu dilaksanakan dengan lebih konsekwen, dirangkaikan dengan langgam kerdja jang tepat,*jaitu memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa dan melaksanakan selfkritik.*

Disamping disana-sini masih ada kekurangan² jang berupa kekakuan, kekurangsaberan dan kelambanan, jang setjara umum perlu diperbaiki adalah melaksanakan apa jang telah disimpulkan dalam Laporan Umum Kongres Nasional Ke-III SOBSI, jaitu *„memperbaiki pekerdjaan menjimpulkan pengalaman² dan mengembalikan kesimpulan² itu kemassa"*. Hingga sekarang masih sering terdjadi hasil² pelaksanaan dokumen² organisasi, seruan² umum dan tuntunan² kongkrit kurang ditjatat, kurang dikontrol dan kurang disimpulkan. Sekarang sudah didapatkan tjara-kerdja untuk mengatasi kekurangan umum itu dengan membuat program kerdja triwulanan, jang disusun, dikontrol dan disimpulkan hasil² pelaksanaannja setjara kolektif. Tjara-kerdja ini mengurangi sema-

ngat kerdja „panas² tai ajam" dan mendorong pembuatan laporan² periodik. Pengalaman² aksi selama setahun ini memberikan peladjaran, bahwa banjaknja aksi² jang berhasil, selain karena tepatnja garis pimpinan aksi, adalah dikarenakan objektifnja tuntutan² mengenai soal² sosial-ekonomi, demokrasi dan politik jang dirumuskan dalam program kerdja triwulanan, dengan demikian pelaksanaan tuntutan² itu dapat diikuti dan disimpulkan perkembangannja. Berdasarkan pengalaman² jang baik ini, maka perlu diadakan *gerakan memperbaiki tjara memimpin dengan membiasakan bekerdja dengan program triwulanan jang memuat sekaligus pekerdjaan² ber-kobar² dan pekerdjaan² tekun dibidang aksi, organisasi dan pendidikan.* Berhasilnja tjara kerdja ini jang per-tama² adalah terletak pada adanja kehidupan badan² pimpinan jang normal, jaitu adanja diskusi² kolektif setjara periodik, diperkuatnja badan² pimpinan dan adanja tuntunan² kongkrit dalam melaksanakan program kerdja triwulanan.

Masalah lain jang perlu dipetjahkan adalah masalah lebih memesrakan keakraban dalam hubungan antara kader, baik didalam badan² kolektifnja masing² maupun antara badan² pimpinan atasan dan badan² pimpinan bawahan serta diluar kehidupan organisasi. Keakraban ini perlu dipupuk dan dikembangkan untuk lebih memperkuat tekad berdjuang dengan satu fikiran, satu hati dan satu tudjuan, dalam keadaan semangkin banjaknja pekerdjaan dan semakin beratnja beban penghidupan.

Keakraban kita adalah keakraban sedjati jang bersandarkan atas memperkuat setiakawan dalam mengabdi perdjuangan kaum buruh dan perdjuangan nasional. Lain halnja adalah keakraban burdjuis jang merupakan keakraban jang palsu jang bersandarkan atas mengedjar keuntungan bagi kepentingan diri sendiri. Kebiasaan² burdjuis jang dapat merenggangkan keakraban kita haruslah kita perangi, misalnja membiarkan kesalahan kawan untuk menutupi kekurangannja sendiri, memilih kawan menurut selera pribadinja, tidak berminat mendengarkan pendapat² jang dianggap tidak menjangkut kepentingan pribadinja, membiarkan orang lain djatuh sakit dan hidup terlantar, asalkan dirinja terdjamin dll.nja.

Untuk memesrakan keakraban itu badan² pimpinan dan kader² atasan hendaknja mengambil inisiatif² dengan mengadjak berunding kader² bawahan jang dipimpinnja

dalam melaksanakan tugas² dan putusan² organisasi, bersikap tepat dalam menerima pendapat² atau kritik² dari bawah, tidak mudah mengetjap dan melemparkan tjelaan² kebawah, sabar dalam memberikan pendjelasan² jang diperlukan, berminat dalam memetjahkan kesulitan² kader dll.nja.

Keakraban kita adalah keakraban jang wadjar, jang mentjerminkan semangat solidaritet jang tinggi, jaitu merasakan suka-dukanja kawan lain sebagai suka-dukanja sendiri. Keakraban sedjati tidak bisa di-bikin², tetapi bersemajam dalam hati-nurani kita sebagai hasil usaha jang tiada henti²nja dalam mengusahakan pembulatan fikiran dan pengertian, pendidikan revolusioner dan perdjuangan bersama untuk membetulkan fikiran² jang keliru dan mengatasi tjara memimpin jang liberal dan subjektif. Disamping memetjahkan masalah keakraban melalui diskusi² kolektif, adalah perlu untuk dilandjutkan pelaksanaan salah satu tjara untuk mengakrabkan hubungan sebagaimana pernah kita tetapkan bersama, jaitu adanja usaha² dari kader² atasan untuk menjempatkan diri „omong² biasa" dengan kader² jang dipimpinnja. Tjara ini ternjata mudah menumbuhkan saling pengertian antara sesama kader dan antara kader² atasan dan kader² jang dipimpinnja. Kader² kita pada umumnja tinggi semangatnja. Sambil membanting tulang mengatasi kesulitan² penghidupan se-hari², mereka terus bekerdja dan beladjar untuk kepentingan kaum buruh, kemadjuan tanah-air dan kemenangan Revolusi Indonesia. Mereka menjadari bahwa bantuan materiil jang dapat diberikan oleh organisasi adalah terbatas. Jang mereka harapkan adalah supaja kader² atasan lebih memahami isi hati dan fikiran kader² jang dipimpinnja dan terus ditegakkan politik kader jang tepat.

Inisiatif² dan usaha² untuk lebih memesrakan keakraban itu pasti mempertinggi semangat kader dalam mengatasi kesulitan jang bagaimanapun beratnja. Sudah barang tentu inisiatif² itu diambil dan dilaksanakan dengan tidak melupakan usaha² jang tiada henti²nja untuk mendidik kader² bawahan bersikap korek terhadap pimpinannja dan melaksanakan se-baik²nja segala petundjuk atasannja. Usaha² ini hendaknja dipadukan dengan usaha² menanamkan semangat 3-baik; jaitu bekerdja baik, beladjar baik dan moral baik dan dengan usaha² mengembangkan kegiatan² kolektif untuk mengatasi kesulitan² penghidupan se-hari².

Djika diteliti, masih dipersoalkannja masalah keakraban adalah disebabkan karena masih adanja gedjala² liberalisme dalam kehidupan organisasi se-hari². *Karena itu gerakan memperbaiki tjara memimpin jang dirangkaikan dengan perbaikan langgam kerdja tidak dapat dipisahkan dengan perdjuangan melandjutkan memerangi liberalisme.*

Pekerdjaan organisasi lainnja jang tidak dapat diabaikan adalah kegiatan² kebudajaan dan olahraga jang biasa kita sebut kebora. Kegiatan² kebora ini jang kita lakukan setjara sedar dan intensif sedjak Konfernas SOBSI pada tahun 1952 terus meluas dan telah meliputi beberapa tjabang kesenian dan olahraga serta dilakukan disebagian besar lapangan kerdja dan daerah. Kegiatan² kebora ternjata tidak hanja membangkitkan tuntutan² dibidang kebora di-organisasibasis², djuga telah menambah kuatnja persatuan kaum buruh, menambah eratnja perhubungan kaum buruh dengan golongan² Rakjat lainnja dan menambah keakraban dalam kehidupan kader sehari². Untuk mengkonsolidasi hasil² kebora jang telah ditjapai, pada bulan Maret 1961 oleh Sekretariat Dewan Nasional SOBSI telah diselenggarakan diskusi kerdja dengan PP² Serikatburuh dan PD² SOBSI di Djawa.

Sesuai dengan Plan 3 Tahun SOBSI, maka pada waktu sekarang kegiatan² kebora dipusatkan untuk mewudjudkan adanja paduan² suara atau koor² SOBSI, melantjarkan gerakan menjanjikan 3 lagu wadjib SOBSI, jaitu lagu² Indonesia Raja, Internasionale, Bendera Merah dan 1 Mei, ditambah dengan lagu² NASAKOM dan RESOPIM. Kegiatan² lainnja adalah meratakan gerakan PBH dan menghidupkan kesebelasan² sepak-bola atau salah satu tjabang olahraga lainnja jang sudah mungkin dilaksanakan. Untuk berhasilnja semua pekerdjaan ini sangat diperlukan adanja bagian² atau petugas² kebora di PP² Serikatburuh, PD² dan PT². SOBSI.

Saudara² jang tertjinta,

Setjara umum dapatlah disimpulkan, bahwa sesudah Sidang Ke-III Dewan Nasional SOBSI sekarang ini, kegiatan² pokok SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja diarahkan untuk menjelesaikan tiga soal nasional

jang kongkrit, jaitu:

Pertama: memperluas hak² demokrasi bagi Rakjat dengan memperdjuangkan pelaksanaan Instruksi Presiden tentang perluasan demokrasi, rituling alat² negara dan pembentukan Kabinet Gotong-Rojong serta melandjutkan tuntutan pentjabutan keadaan bahaja dan penindjauan kembali UUKB jang berlaku sekarang;

Kedua: mempertinggi produksi, melawan mismanagement dan subversi ekonomi imperialis dan komplotannja untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri dengan tidak mengendorkan aksi² sosial-ekonomi jang adil dan masuk akal dan terus memperdjuangkan pembentukan Dewan² Perusahaan, Dewan² Pertimbangan didepartemen² dan djawatan² dan Dewan² Produksi Pertanian dan Pengawas distribusi, dengan ikutsertanja wakil² serikatburuh², serikattani² dan organisasi² Rakjat lainnja jang bersangkut-paut dengan produksi dan distribusi. Memusatkan kegiatan² mempertinggi produksi untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan, bersamaan dengan itu melantjarkan pengangkutan dan perhubungan didarat, laut dan udara dan memadjukan industri dalam negeri. Menjingkirkan beberapa penjakit jang menghambat kelantjaran pelaksanaan program ekonomi, terutama penjakit Komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi jang masih ngendon didalam alat² negara, dan

Ketiga: melandjutkan perdjuangan pembebasan Irian Barat dengan memperkuat kewaspadaan nasional terhadap bahaja neo-kolonialisme dan terus menjalakan api Trikora dan memperkuat kegotongrojongan nasional jang berporoskan Nasakom.

Untuk menjelesaikan *„tiga soal nasional kongkrit"* itu se-baik²nja, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja berkewadjiban mensukseskan gerakan pendidikan aktivis² organisasi-basis setjara besar²an dan memperbaiki tjara memimpin, terutama meluaskan tjara kerdja dengan program kerdja kwartalan dan lebih memesrakan keakraban dalam kehidupan kader.

Dorong madju demokrasi dan produksi! Landjutkan perdjuangan pembebasan Irian Barat! Laksanakan seruan Presiden Sukarno pada Hari 17 Agustus 1962, jaitu „..... biar andjing menggonggong, hajo berdjalan terus, diatas Landasan Manipol dan RESOPIM".

T J A T A T A N

R a l a t

Dihalaman 3 baris kedua alinea pertama kalimat jang berbunji : Dengan suara bulat dan segera mantap, Sidang Ke-II mestinja berbunji : **Dengan suara bulat dan setjara mantap, Sidang ke-II**



Persatuan 531 - 62 - 5000 ex.